



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
JLN JENDERAL AHMAD YANI – TELP. ( 0380 ) 21751 FAX. ( 0382 ) 21655  
M A U M E R E     **KODEPOS : 86111**

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN SIKKA

NOMOR ... TAHUN 2022

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIKKA

NOMOR ... TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIKKA

TAHUN 2019-2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Sikka Nomor 43 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor ..... Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 43 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2019 - 2023, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka Nomor .....Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 118);

8. Peraturan Bupati Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);
9. Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Sikka Nomor 43 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 44),
11. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka Nomor .... Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Sikka Nomor ..... Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 Tahun 2019-2023;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka Nomor .... Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Sikka



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KABUPATEN SIKKA  
NOMOR           TAHUN 2022  
TANGGAL                 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN SIKKA NOMOR .... TAHUN 2021  
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN  
SIKKA TAHUN 2019-2023

- A. INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIKKA
- Perangkat Daerah       : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka
- Visi                        : Terpenuhinya Hak-Hak Dasar Masyarakat Menuju Sikka Bahagia  
2023
- Misi                        : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas  
Mewujudkan Reformasi Birokrasi
- Tugas                      : Melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di bidang Kesatuan  
Bangsa dan Politik
- Fungsi                    :  
a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan  
bangsa dan politik;  
b. Pemberian rekomendasi teknis perizinan dan pelaksanaan  
pelayanan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik;  
c. Pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang kesatuan bangsa  
dan politik;  
d. Pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan di bidang  
kesatuan bangsa dan politik yang diserahkan ke kabupaten;  
e. Pelaksanaan urusan tata usaha badan; dan  
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan  
tugas dan fungsi.

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kehidupan berpolitik dan berdemokrasi	Indeks Demokrasi	Jumlah aspek yang dilaksanakan dibagi total aspek dikalikan 100%	Indeks	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	Persentase peran serta masyarakat yang ikut dalam pelaksanaan pemilu	Kepala Bidang Politik	DAU
2	Meningkatnya Pembinaan terhadap Partai Politik	Cakupan Partai politik yang dibina	Jumlah Partai Politik Yang dibina dibagi Jumlah Partai Politik kali 100		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen program kerja yang disusun dibagi jumlah dokumen program kerja dikali 100		
					Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan kegiatan dibagi jumlah kegiatan yang dilaksanakan kali 100		
3.	Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, Idiologi dan pembauran kebangsaan	Persentase penurunan konflik social	Jumlah Potensi Konflik yang di pantau dibagi Jumlah Konflik yang terjadi kali 100	%	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	Prosentse Pemahaman idiologi dan karakter bangsa	Kepala Bidang Wasbang	DAU
					Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen program kerja yang disusun dibagi jumlah dokumen program kerja dilaksanakan dikali 100		
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan kegiatan dibagi jumlah kegiatan yang dilaksanakan kali 100		

					<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Prosentase Pembinaan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kepala Bidang Ketahanan	DAU
					Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen program kerja yang disusun		
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan kebijakan		
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan kegiatan		
					<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	Kepala Bidang Ketahanan	DAU
					Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen program kerja yang disusun		
					Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Perumusan kebijakan yang disusun		
					<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Prosentase Penanganan konflik sosial dalam masyarakat	Kepala Bidang Wasnal	DAU

					Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen program kerja yang disusun		
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan kebijakan		
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan kegiatan		
4.	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN		Indeks			Badan Kesbangol	DAU
5.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Kesbangpol		Indeks			Badan Kesbangpol	DAU
					<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi.	Sekretaris	DAU
					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Kesbangpol	Kasubag pep	
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi.	Kasubag pep	
					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	



					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi.	Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan	
					Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi.	Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan	
					Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi.	Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan	

**B. TARGET TAHUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIKKA**

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2018	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kehidupan berpolitik dan berdemokrasi	Indeks Demokrasi	Indeks	87,31 %			50 %	60 %	70 %	70 %
2	Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, Idiologi dan pembauran kebangsaan	Persentase penurunan konflik social	%		50	53	57	59	62	62
3	Meningkatnya Pembinaan terhadap Partai Politik	Cakupan Partai politik yang dibina	%	82,47 %	100	100	100	100	100	100
4	Meningkatkan profesional ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	54,03	54,03	54,60	55,20	60,20	63,40	63,40
5	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Kesbangpol	Indeks	0,28	0,28	0,30	0,35	0,48	0,50	0,50

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Sikka,

